

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Krisis kemanusiaan sering digambarkan sebagai masalah kesehatan fisik, ketidakstabilan ekonomi sosial, atau kesejahteraan fisik dan mental masyarakat. Penyebabnya bisa bermacam-macam, termasuk kelaparan, genosida, penyakit kronis, dan perang saudara. Anak-anak, perempuan, dan orang lanjut usia seringkali menjadi sekelompok masyarakat yang terdampak akibat krisis yang terjadi. Beberapa negara di Afrika, Amerika Latin, Asia telah mengalami krisis kemanusiaan yang parah selama kurang lebih tiga hingga empat tahun terakhir. Salah satu negara yang mengalami krisis kemanusiaan saat ini adalah Afghanistan. Afghanistan mengalami krisis ekonomi dan krisis kemanusiaan yang signifikan, yang disebabkan oleh konflik berkepanjangan di negara tersebut pada tahun 1980-an. Tragisnya, perang Afghanistan belum berakhir dan negara ini masih menghadapi krisis kemanusiaan yang serius (Hussain 2022).

Gejolak politik seperti perang dan konflik merupakan permasalahan yang sering terjadi di negara-negara berkembang. Pasca tahun 1973, pemerintahan kerajaan Afghanistan mengalami keruntuhan dan masyarakatnya dihadapkan pada konflik dengan negara lain, seperti Uni Soviet dan Amerika Serikat. Akibatnya, terjadi ketidakstabilan ekonomi, politik, sosial yang buruk. Wilayah Afghanistan juga menjadi tempat konflik antar blok barat dan blok timur setelah berakhirnya

perang dingin, yang mengakibatkan sistem pemerintahan pun berubah dengan cepat dari Republik ke pemerintahan Komunis.

Salah satu konflik terbesar yang terjadi di Afghanistan ialah perang Soviet-Afghanistan (1979-1989), konflik ini dianggap konflik terbesar yang terjadi sejak Perang Dingin. Invasi pasukan militer Soviet terjadi setelah Revolusi Saur, yang dimana Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan mengambil inisiatif dan melakukan reformasi radikal dan modernisasi di negara tersebut. Pada awal konflik, perang Soviet-Afghanistan dilakukan sebagai penasihat, dengan tujuan utama yaitu untuk mendukung pemerintahan komunis dan memajukan ideology marxis dan sosialis. Akibat pemberontakan bersenjata yang terjadi di Afghanistan, Uni Soviet memutuskan untuk melakukan intervensi militer untuk menstabilkan situasi di negara tersebut. Dan konflik berlangsung selama sepuluh tahun. Konflik ini mempertemukan pasukan gabungan Uni Soviet dan Republik Demokratik Rakyat Afghanistan untuk melawan Mujahidin yang didukung oleh Amerika Serikat. Namun, terdapat perlawanan dari kelompok Mujahidin untuk melawan komunis Afghanistan dan Uni Soviet, hal tersebut mendapatkan dukungan dari negara-negara tetangga seperti Pakistan, Republik Islam Iran, dan Republik Tiongkok.

Pasukan Soviet mengawali perang tanpa persiapan, namun seiring berjalannya waktu, taktik militer mereka semakin baik dalam perang anti-gerilya. Akan tetapi, langkah penyelesaian gagal akibat berbagai faktor yang tidak bisa dicapai. Pada pertengahan tahun 1980-an, akibat dari kemerosotan ekonomi dan perubahan dalam partai komunis Uni Soviet, kebijakan Moskow yang ikut berubah, pasukan Soviet mulai menarik diri secara bertahap dari afgahnistan pada tahun 1989. Pasca Soviet menarik diri dari Afghanistan, konflik tersebut memicu pada perang yang lebih

besar, yang dimana kelompok-kelompok mujahidin terlibat dalam persaingan untuk memperebutkan kekuasaan yang mengakibatkan banyak korban jiwa (Mutawally 2022).

Ditengah-tengah perang, muncullah sebuah organisasi yang dikenal sebagai Taliban. Taliban merupakan sebuah organisasi massa di bentuk setelah perang Afghanistan pada tahun 1990-an dan didirikan pada tahun 1994, oleh Mullah Omar, seorang mantan anggota Mujahidin Afghanistan selama perang Uni Soviet-Afghanistan. Mullah Omar beserta 50 siswa madrasah dari Afghanistan timur dan selatan mendirikan organisasi Taliban bertujuan untuk membentuk pemerintahan berbasis hukum syariah sesuai kebijakan mereka dan membangun Afghanistan sebagai negara Imarah Islam afghanistan. Arti dari kata “Taliban” sendiri ialah “Pelajar”, hal ini dikarenakan para anggotanya merupakan para pelajar madrasah sebelum terlibat dalam peperangan. Latar belakang munculnya Taliban ini disebabkan oleh adanya kekecewaan Mullah Omar yang menyaksikan tingginya tingkat pemerkosaan, pembunuhan, dan tindakan kriminal lainnya. Oleh karena itu, ia berusaha untuk memperbaiki situasi Afghanistan yang kacau pada masa tersebut. Setelah berhasil meningkatkan keamanan dan stabilitas negara, Pembentukan organisasi Taliban ini mendapatkan dukungan yang kuat dari penduduk Afghanistan, sehingga Taliban mampu mengumpulkan banyak pengikut serta menguasai ibu kota Afghanistan, yaitu Kabul.

Dalam sejarahnya, Taliban berhasil menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan sebelum mendirikan Imarah Islam Afghanistan pada tahun 1996. Namun, pendirian Imarah Islam Afghanistan oleh Taliban menyebabkan pemerintahan Afghanistan menjadi pemerintahan terror. Selama masa tersebut,

yang bertanggung jawab mengatur hukum ialah kementerian Amar bil M'ruf wa Nahi an al-Munkar. Kementerian tersebut menerapkan hukum syariah yang ketat dan menolak terhadap modernitas. Taliban juga menetapkan kebijakan diskriminasi terhadap perempuan, melarang anak perempuan bersekolah, dan melarang perempuan bekerja. Taliban telah melanggar hak-hak anak dan perempuan dalam banyak hal. Akibatnya, banyak masyarakat Afghanistan yang kehilangan hak-hak kemanusiaannya, seperti anak-anak dan perempuan. Selain itu, Taliban mengancam hak-hak sipil dan politik untuk mengubah kebijakan politik dan keamanan rakyat Afghanistan sesuai dengan ketentuan konstitusi mereka. Taliban memerintah dengan cara yang keras pada akhir 1990-an, hal tersebut dikonfirmasi oleh misi PBB di Afghanistan, dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Taliban juga mengancam para jurnalis dan membatasi kebebasan pers yang menyebabkan ditutupnya berita pada media massa. Hal tersebut menyita perhatian PBB, sehingga PBB mengecam tindakan tersebut dan berniat untuk menghentikan bantuannya kepada Afghanistan (Laub 2014).

Kemunculan Taliban membuat Amerika Serikat memanfaatkan kesempatannya sebagai peluang untuk menyumbangkan dana kepada Badan Intelijen Pakistan dan sekutu Islamis Afghanistan. dan pada tahun 1990-an hanya negara Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Pakistan yang pertama kali mengakui adanya Rezim Taliban. Ketika Pakistan mengakui adanya Rezim Taliban pada tahun 1996, ibu kota negara Pakistan yaitu Islamabad sedang menghadapi krisis ekonomi dan rekor inflasi. Sejak hal itu, Pakistan hanya bergantung pada bantuan-bantuan lembaga keuangan internasional. Dengan seiring berjalannya waktu, banyak negara-negara yang tertarik bekerjasama dengan Taliban, terutama dalam bidang-bidang seperti kontra-

terorisme, kontra-narkotika, keamanan perbatasan, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, serta dukungan teknis. Negara-negara tersebut ialah China, Iran, Rusia, Turki, Qatar, dan sejumlah negara tetangga di Asia Tengah.

Pemerintahan Afghanistan di bawah Taliban sejak tahun 1996 hingga akhir tahun 2001, hanya diakui oleh Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. kelompok Taliban telah berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Afghanistan dan mengumumkan terbentuknya negara Imarah Islam Afghanistan meskipun belum resmi diakui oleh dunia. akan tetapi, pada masa tersebut, dunia dan masyarakat umum Afghanistan kurang menerima adanya Rezim Taliban untuk berkuasa, sehingga banyak menuai kritik dan tanggapan yang bertentangan. Karena dianggap dapat menimbulkan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Afghanistan. khususnya bagi kaum minoritas, perempuan dan anak-anak (Suharto and Novita Apriyani 2022).

Pada tahun 2018, Taliban dan Amerika Serikat mengadakan pertemuan resmi dengan negara-negara lain seperti Arab Saudi, Pakistan, dan Uni Emirat Arab untuk mendiskusikan masalah penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Namun, diskusi tersebut gagal akibat perbuatan Taliban yang menyerang dan membunuh seorang anggota pasukan AS. Sedangkan diskusi tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak. Perpecahan ini mengakibatkan kesulitan dalam menegakkan kebijakan, sehingga terjadi perubahan yang signifikan dalam pola kebijakan luar negeri AS di Afghanistan. Pasca dua dekade, Taliban bangkit kembali pada 18 Agustus 2021, dengan resmi mengumumkan kembali pembentukan Imarah Islam Afghanistan setelah berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintah Afghanistan. dilatarbelakangi oleh Taliban yang merebut pemerintahan

yang dipimpin oleh Ashraf Ghani, ketika Ashraf meninggalkan Afghanistan pada tanggal 15 Agustus 2021. Kemudian Taliban menaklukan Kabul dan menghadapi sedikit perlawanan dari pasukan Presiden Ashraf Ghani. Setelah militer AS menggulingkan Taliban pada tahun 2001, Taliban mendapatkan kembali kekuasaannya (Laub 2014).

Pengambil alihan kekuasaan tersebut mendapat persetujuan dari mantan presiden Afghanistan, yaitu Mohammad Ashraf Ghani. Bahkan hal tersebut dilakukan dengan cepat, dalam kondisi yang dilatarbelakangi oleh adanya tindakan penarikan pasukan oleh Amerika Serikat dan North Atlantic Treaty Organization (NATO) pada bulan Mei 2021 yang telah memerintah negara Afghanistan selama 20 tahun, dengan menyatakan berakhirnya kampanye kontra-terorisme. Keputusan AS-NATO untuk menarik diri dari Afghanistan merupakan peluang besar bagi Taliban, karena dapat merebut kembali kekuasaan mereka atas Afghanistan. Hal ini didorong oleh kesepakatan antara Washington dengan Taliban pada Februari 2020. Kesepakatan tersebut berisi Perjanjian Doha yang mengarah pada perebutan kembali pasukan AS dan koalisi. Kesepakatan tersebut berisi syarat bahwasanya Al-Qaeda dan kelompok ekstremis lainnya tidak diizinkan untuk beroperasi di wilayah yang berada di bawah kendali AS. Invasi militer yang dilakukan oleh AS-NATO untuk menggantikan Rezim Taliban didasari oleh adanya dugaan bahwa Osama Bin Laden, Pemimpin Al-Qaeda yang dicurigai merencanakan serangan terhadap menara kembar WTC di New York pada tanggal 11 September 2001 ini dilindungi oleh Taliban. Meskipun dugaan tersebut tidak terbukti, AS dan NATO tetap menyerang Afghanistan pada 7 Oktober 2001, dinamai dengan Operasi Enduring Freedom Afghanistan (OEF-A) dan didasari dengan *war on terror*.

Serangan militer tersebut untuk merebut kekuasaan Taliban dan kekuasaan pemerintahan Afghanistan, sehingga menyebabkan kerusakan ditandai dengan banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban jiwa. Akibatnya, invasi yang dilakukan oleh AS-NATO ke Afghanistan pada tahun 2001, merupakan cara untuk merebut kekuasaan secara paksa dari Taliban yang merupakan penguasa yang sah dan berdaulat, yang kemudian berdampak pada krisis kemanusiaan yang parah. Sehingga rasional jika Taliban mencoba kembali mengambil alih kekuasaan Afghanistan pasca AS-NATO melakukan penarikan pasukannya dari Afghanistan (Juanda 2021).

Akibat dari konflik yang terjadi di Afghanistan selama beberapa tahun lamanya, Afghanistan mengalami krisis kemanusiaan yang semakin parah. Krisis kemanusiaan tersebut sangat berdampak terhadap anak-anak di Afghanistan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Sebanyak 1,5 juta jiwa tewas dalam perang selama 20 tahun lamanya, dan 41 persen anak-anak tidak memenuhi kriteria pertumbuhan normal, dan sekitar 14 juta anak Afghanistan berisiko mengalami kelaparan setiap minggunya. Serta banyak anak-anak khususnya anak perempuan yang dilarang untuk bersekolah dan bekerja secara mandiri. Jika krisis kemanusiaan ini tidak segera ditangani, akan banyak jiwa yang terdampak akibat hak-hak nya tidak terpenuhi (Rahmat et al. 2022).

Pasca Taliban mengambil alih kekuasaan, terdapat banyak pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, anak-anak, dan hak asasi manusia. Taliban menyebut diri mereka sebagai “Emirat Islam Afghanistan” meskipun terdapat jaminan bahwa perempuan akan diizinkan untuk belajar dan menikmati hak-hak mereka di bawah hukum syariah, termasuk hak untuk bekerja secara mandiri. Tetapi Taliban

melarang mereka untuk melakukan keduanya. Mereka juga tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam politik. Mereka bahkan tidak diizinkan untuk bersekolah atau bekerja diluar rumah setelah kelas enam SD. Selain itu, mereka memberlakukan pembatasan pada perilaku sosial seperti larangan musik, tarian, televisi, dan radio. Sektor pendidikan di Afghanistan mengalami kemunduran pasca Taliban perebutan pemerintahan Afghanistan pada 15 agustus 2021. Oleh karena itu, akibat dari sistem yang tidak berkembang secara linier, pendidikan terhadap anak perempuan lebih menderita dibandingkan anak laki-laki. Selama beberapa dekade terakhir, pendidikan semakin dipolitisasi karena perubahan Rezim yang cepat dan penuh kekerasan yang melibatkan ideologi yang berlawanan. Hal ini diperlukan modifikasi pada kebijakan, praktik, dan struktur organisasi untuk meningkatkan sistem pendidikan Afghanistan. Setelah tahun 2001, terjadi peningkatan bantuan keuangan dan strategis yang ditujukan untuk memperbaiki dan merekonstruksi negara Afghanistan, terutama di bidang pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kemajuan sektor pendidikan Afghanistan ini mendapatkan dukungan dari organisasi internasional yaitu UNICEF. UNICEF meluncurkan “kampanye Kembali ke Sekolah” pada tahun 2001. Hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem pendidikan Afghanistan, yang berhasil membangun 200 persen lebih banyak sekolah dan mempekerjakan 500 persen lebih banyak guru dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Selain itu, tingkat pendaftaran meningkat secara signifikan pada tahun 2004 pasca turun dari 32 persen menjadi 6,4 persen pada masa awal pemerintahan Taliban di Afghanistan (Easar et al. 2023).

Taliban menutup sekolah khususnya bagi anak perempuan ketika mereka mengambil alih Afghanistan, tetapi mereka berjanji untuk menghormati hak anak

perempuan atas pendidikan. Namun, pada tanggal 23 Maret 2022, ketika sekolah dimulai kembali, tanpa rasa bersalah, Taliban mengingkari janji tersebut dan memulangkan para siswa. Pendidikan merupakan jalur kehidupan bagi semua anak, terutama anak perempuan. Tanpa pendidikan, anak perempuan berisiko tinggi mengalami kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi, termasuk pernikahan dini. Demi kelangsungan hidup anak perempuan di Afghanistan dan demi masa depan negara, Save the Children, PBB dan Organisasi Internasional lainnya menghimbau Taliban untuk segera mengizinkan anak perempuan dari segala usia untuk kembali ke sekolah (Ocha 2022).

United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan organisasi internasional yang didirikan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1946 setelah perang dunia II berakhir. UNICEF mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kualitas hidup anak dan memberikan naungan kemanusiaan terhadap anak-anak dan remaja yang kehidupannya dan masa depannya terancam, serta menjangkau setiap anak yang membutuhkan hak-hak untuk hidup, sehat, dan berkembang. Alasan lain didirikannya UNICEF adalah karena organisasi tersebut mempunyai misi yang konsisten dalam menghadapi krisis global dan isu-isu kontemporer yang berdampak pada jutaan anak-anak. Sepanjang sejarahnya, UNICEF telah memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan terhadap semua anak di dunia. Pada 75 tahun terakhir, misi UNICEF telah mengalami perkembangan dalam menangani kebutuhan anak-anak di seluruh dunia. Dan UNICEF telah bekerja lebih dari 190 negara dan wilayah untuk melindungi nyawa anak-anak, menangani anak-anak yang mengalami perlakuan buruk, dan membantu mereka dalam mewujudkan potensi dari masa kanak-kanak hingga dewasa (Unicef 2023b).

Sistem pendidikan anak di Afghanistan telah runtuh akibat konflik yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Bagi banyak anak di Afghanistan, menyelesaikan sekolah dasar merupakan mimpi yang masih sulit untuk di capai, terutama di daerah pedesaan dan untuk anak perempuan. Meskipun terdapat kemajuan baru untuk meningkatkan pendidikan, tetapi masih kurang memiliki akses khususnya untuk anak-anak perempuan.

Krisis kemanusiaan dan kondisi anak-anak di Afghanistan menjadi perhatian yang serius bagi UNICEF. UNICEF hadir di Afghanistan untuk melindungi dan mendukung anak-anak mendapatkan hak nya khususnya dalam hak atas pendidikan yang layak dan nyaman. UNICEF melakukan tugasnya, seperti menyediakan bantuan untuk permasalahan yang melibatkan anak-anak serta didedikasikan untuk membela dan melestarikan hak-hak anak. Melalui Humanitarian Action for Children's dengan program Education di Afghanistan, UNICEF melakukan tugasnya dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi anak yang paling rentan, melakukan kerjasama dengan pemerintah dan para mitra selama beberapa dekade untuk meningkatkan jumlah anak yang bersekolah, meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan melakukan advokasi bersama tingkat pemerintahan tertinggi dan memberikan dukungan teknis serta keuangan, serta melakukan kesiapsiagaan dan tanggap darurat untuk memastikan anak-anak tetap bersekolah selama bencana dan konflik (Unicef 2016a).

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“PERAN UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND DALAM MENANGANI PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DI AFGHANISTAN”**.

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana Upaya UNICEF melalui program Education dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan di Afghanistan?”.**

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis akan memfokuskan pembahasan ini terhadap fenomena Taliban di Afghanistan yang berdampak pada hak pendidikan anak di Afghanistan, serta implementasi program Education UNICEF dalam memenuhi hak anak atas pendidikan di Afghanistan pada tahun 2018-2022.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran UNICEF dalam menangani pemenuhan hak anak atas pendidikan di Afghanistan.
2. Untuk mengetahui kondisi pendidikan anak di Afghanistan.
3. Untuk mengetahui implementasi program Education UNICEF dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Afghanistan.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan mengenai konflik Afghanistan dan menganalisis dampaknya

terhadap permasalahan hak anak serta peran UNICEF dalam menangani permasalahan hak anak di Afghanistan.

2. Kegunaan Praktis

Untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.